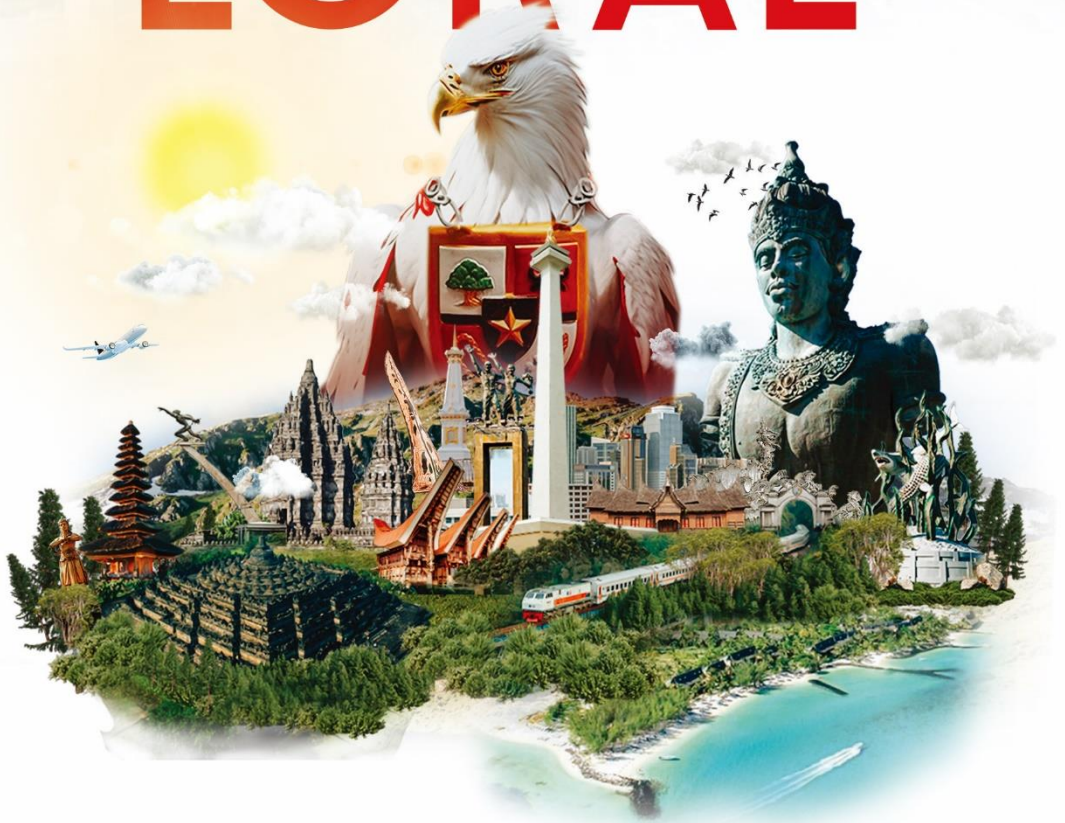


KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS

KEARIFAN LOKAL



Dr. Ibrahim Chalid, S.Sos., M.Si
Dr. Drs. Aiyub, M.Si

Kebijakan Pembangunan
----- *Berbasis* -----
KEARIFAN LOKAL

Dr. Ibrahim Chalid, S.Sos., M.Si.
Dr. Drs. Aiyub, M.Si.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Copyright @ 2026 By Dr. Ibrahim Chalid, S.Sos., M.Si. dan

Dr. Drs. Aiyub, M.Si.

All right reserved

Penulis

Dr. Ibrahim Chalid, S.Sos., M.Si.

Dr. Drs. Aiyub, M.Si.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Aflia Riski, S.IAN., M.AP.

Richa Meliza, S.Sos., M.Ant.

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

[www. penerbitbukumurah. com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-124-1

Cetakan ke-1, Januari 2026

15,5 x 23 cm, xx + 502 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

PRAKATA

LATAR belakang penulisan buku ini berangkat dari kebutuhan mendalam akan pemahaman yang komprehensif tentang peran budaya dan kearifan lokal dalam membentuk kebijakan publik yang berkelanjutan dan relevan dengan konteks pembangunan di Indonesia. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep, teori, dan praktik kebijakan berbasis budaya atau antropologi kebijakan, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian kebijakan nasional. Ruang lingkup materi mencakup berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, politik, lingkungan, serta studi kasus nasional dan internasional yang relevan. Target pembaca utama adalah mahasiswa, akademisi, praktisi kebijakan, serta pemangku kepentingan yang ingin memperdalam pemahaman tentang integrasi budaya dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberi inspirasi dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan mendorong pengembangan kebijakan yang berbudaya dan berkelanjutan.

Dr. Ibrahim Chalid, S.Sos., M.Si
Dr. Drs. Aiyub, M.Si

KATA PENGANTAR

BUKU ini disusun sebagai upaya untuk menjembatani antara teori dan praktik dalam pengembangan kebijakan publik yang berlandaskan pada kearifan lokal dan antropologi kebijakan. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan tradisi, pendekatan berbasis budaya menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui struktur yang sistematis, buku ini mengupas berbagai konsep dasar, teori, serta studi kasus yang relevan, baik secara nasional maupun internasional. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang ingin memperdalam pemahaman tentang pentingnya budaya dalam proses kebijakan. Semoga karya ini mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu kebijakan berbasis budaya dan antropologi, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Editor

KATA PENGANTAR

MENJAGA KONSISTENSI PEMBANGUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Amich Alhumami, Ph.D

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas

DALAM beberapa dekade terakhir, isu pembangunan berkelanjutan mengemuka dalam wacana publik dan debat akademik di kalangan para sarjana, intelektual, pemikir, dan peneliti. Tema penting ini menjadi pokok bahasan dalam berbagai kajian dan riset ilmiah sebagai ekspresi keprihatinan yang mendalam atas eksploitasi berlebihan sumber daya alam (SDA), yang dalam waktu sangat lama menjadi tumpuan pembangunan. Eksploitasi SDA yang berlangsung eksekutif dalam bentuk industri ekstraktif telah menyebabkan kerusakan lingkungan parah dan menciptakan krisis iklim akut, yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia dan masyarakat. Karena itu, harus dilakukan reorientasi pembangunan dengan cara mengubah model dan menawarkan pendekatan baru, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, lebih mengutamakan konservasi alam dan pelestarian lingkungan, yaitu pembangunan berbasis kearifan lokal.

Pembangunan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) adalah suatu pendekatan baru dalam pembangunan, yang mencoba mengintegrasikan pengetahuan modern, pemikiran teknokratik, pengetahuan lokal—mencakup pula *tacit knowledge*—dan praktik-

praktik tradisional di dalam masyarakat, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kearifan lokal, Clifford Geertz (1985) menggunakan istilah *local knowledge*—pengetahuan lokal, mencakup praktik-praktik baik yang dijalankan secara alamiah di suatu komunitas, kontekstual dengan kondisi ekologi yang melingkupi kehidupan masyarakat; suatu pengetahuan praktis yang bersifat dinamis yang berkembang sejalan dengan pengalaman nyata-aktual, yang bertumpu pada tradisi, budaya, dan lingkungan di mana komunitas menjalani kehidupan keseharian.

Pengetahuan lokal tersimpan dalam memori kolektif setiap warga komunitas; mereka menghimpun rangkaian persepsi, fakta-fakta empiris, keyakinan, dan kecakapan natural, yang diperoleh dari proses interaksi dengan alam dan lingkungan. Rangkaian pengetahuan ini mengendap dalam waktu lama, mengalami internalisasi di dalam pikiran dan jiwa setiap warga komunitas, sehingga terbangun apa yang disebut "*collection of knowledge, beliefs, skills, facts, practical experiences*." Dengan pengetahuan lokal ini, terbantuk relasi harmonium yang kuat dalam kehidupan antara komunitas, alam, dan lingkungan.

Pengetahuan lokal/kearifan lokal dapat dijumpai, misal, di kalangan para pelaut tradisional, yang mengandalkan pengalaman berbilang tahun dalam membaca posisi bintang di langit sebagai alat navigasi untuk berlayar. Peternak tradisional juga punya pemahaman yang baik bagaimana cara merawat dan mengelola hewan-hewan ternak, yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Nelayan tradisional Pattorani—misal di Sulawesi—selalu merujuk cerita dalam tradisi lisan "Peta Mental" guna mengetahui lokasi yang bagus untuk menangkap ikan, dengan mempelajari arah angin dan pola awan. Petani tradisional juga punya pengetahuan unik dalam menentukan kapan waktu terbaik untuk

mulai bercocok tanam sekaligus menghitung hari/pekan/bulan untuk memanen, bahkan mengetahui titik lokasi tanah yang menjadi sumber mata air untuk irigasi pertanian. Mereka mampu membaca pola cuaca merujuk pada tanda-tanda alam, juga bisa mengenali tingkat kesuburan tanah dan lahan, paham sepenuhnya cara mengelola lahan dengan baik agar dapat berproduksi tinggi. Semua pengetahuan lokal ini sejalan dengan prinsip dan praktik pertanian berkelanjutan—*sustainable farming principles and practices*.

Pengetahuan lokal/kearifan lokal yang menjadi landasan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dan mendorong pembangunan sosial yang bertumpu pada kekuatan komunitas lokal. Semua warga komunitas, yang menjadi sumber pengetahuan lokal/kearifan lokal, terlibat aktif dalam proses pembangunan yang didasarkan pada kesadaran mendalam betapa penting menjaga kelestarian lingkungan, konservasi alam, dan merawat nilai-nilai budaya lokal yang telah hidup lama di dalam masyarakat. Pendekatan ini memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya lokal secara optimal, serta memastikan masyarakat setempat menjadi bagian penting dalam dinamika pembangunan, mengambil peran dan berpartisipasi, serta terlibat penuh dalam semua kegiatan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indonesia adalah bangsa yang dibangun atas dasar kesadaran penuh akan realitas masyarakat yang majemuk, tercermin dalam keragaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, agama, dan keyakinan. Keragaman sosial-budaya ini sangat jenuin yang lahir dari rahim kultur masyarakat Indonesia yang memiliki nilai, norma, dan kepercayaan lokal yang beraneka ragam. Pluralitas masyarakat dan keragaman budaya Indonesia secara *epic* direkam

dalam sebuah studi etnografi oleh ahli antropologi Indonesia terpandang, Koentjaraningrat, yang kemudian menjadi buku fenomenal berjudul "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia" (1999). Melalui buku ini, sang pengarang mengajak para pembaca menjelajahi seluruh wilayah Tanah Air, bertamasya ke pelosok negeri, menikmati khazanah budaya Indonesia yang demikian kaya. Lensa antropologi merekam keragaman dan keindahan kebudayaan Nusantara.

Khazanah kebudayaan Indonesia menjadi elemen kunci dalam proses transformasi masyarakat. Kemajemukan adalah anugerah yang dapat memperkuat khazanah kehidupan sosial-kemasyarakatan serta menjadikan Indonesia sebagai negara adikuasa kebudayaan. Kebudayaan merupakan modal sangat berharga, berkontribusi pada pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian alam, kehidupan bumi dan manusia, serta memperkuat kemajemukan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Saksikan, sejumlah negara e.g. Jepang, Korea Selatan, China, Hong Kong, dan Taiwan mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial-ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui suatu proses modernisasi. Etos kerja, motivasi berprestasi, dorongan untuk maju, semangat berkorban, daya juang adalah sikap mental, yang membentuk nilai-nilai budaya dalam masyarakat, yang dapat dijadikan kekuatan dan sumber energi penggerak pembangunan. Mentalitas dan nilai-nilai budaya menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Eksplorasi etnografis mengenai kemajuan di negara-negara Asia Timur ini mengkonfirmasi hipotesis para ahli antropologi: *culture matters*.

Menyadari betapa penting faktor kebudayaan dalam pembangunan, diperlukan suatu pemahaman yang utuh mengenai

hubungan yang erat dan saling terkait antara kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan. Sistem dan praktik berkebudayaan di dalam masyarakat menjadi kekuatan pendorong dan energi penggerak pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada empat pilar utama: (1) pilar lingkungan dengan mengembangkan kearifan dan pengetahuan lokal dalam konservasi alam dan pelestarian lingkungan; (2) pilar sosial dengan memperkuat penerimaan dan pengakuan atas keragaman, inklusi sosial, non-diskriminasi, kreativitas, daya cipta, dan inovasi sosial; (3) pilar ekonomi dengan menjadikan kebudayaan sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif, pemerataan akses ke sumber-sumber ekonomi produktif, pertumbuhan inklusif, dan pengentasan kemiskinan untuk menghilangkan deprivasi dan mengokohkan kohesi sosial; dan (4) pilar institusi dengan memperkuat pranata dan jaringan sosial serta kelembagaan dan agen-agen pembangunan, yang memiliki integritas, etos maju, etika kerja, dan komitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif kebudayaan. Di sini, kebudayaan dapat mengakselerasi pembangunan sosial-ekonomi dengan mendayagunakan nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi untuk mencapai kemajuan.

Keragaman sosio-kultural masyarakat Indonesia tidak hanya sekadar ornamen budaya yang bersifat statis, melainkan unsur dinamis yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Keragaman sosio-kultural tercermin dalam aneka pranata sosial, afinitas budaya, perkumpulan komunitas, institusi, dan jejaring sosial, yang disebut Robert Putman (2000) sebagai *social capital*. Putman mengidentifikasi setidaknya tiga modal sosial yang penting dalam masyarakat: jaringan sosial, norma, dan kepercayaan. Modal sosial ini digunakan sebagai instrumen penting untuk memfasilitasi kerja kolektif dan kemitraan antarwarga dalam suatu komunitas, yang didasari oleh nilai-nilai kewargaan (*civic values*) sehingga

terbangun suatu pertalian warga (*civic engagement*) yang kuat, dengan perekat sentimen emosional yang lekat.

Kekuatan kolektif berbasis komunitas merupakan modal sangat berharga dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan kemaslahatan umum. Komunitas yang menjadi sendi dasar pertalian warga merupakan sumber nilai dan norma yang memunculkan rasa saling percaya, sehingga mudah dalam menggerakkan semua kekuatan dan mobilisasi sumber daya pembangunan. Hal yang demikian ini merupakan bentuk kearifan lokal yang dapat dijadikan modal sosial dalam menggalakkan pembangunan. Penting ditegaskan, modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang digali dari khazanah budaya bangsa yang bisa menjadi daya rekat persatuan bangsa dan kekuatan penggerak pembangunan. Modal sosial budaya merupakan perangkat lunak yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif serta mendorong proses transformasi sosial-budaya masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor.

Kearifan lokal dapat dikonsepsikan sebagai pengetahuan yang dimiliki suatu komunitas tertentu yang diperoleh melalui pengalaman panjang dan diwariskan secara turun-temurun, serta telah tertanam kuat (*embedded*) dalam kehidupan masyarakat—istilah teknis: *tacit knowledge*. Konsep ini mencakup nilai-nilai budaya (seperti gotong royong di masyarakat Jawa—juga masyarakat lain, Tri Hita Karana di Bali); Pengelolaan sumber daya alam (seperti sistem Subak di Bali, Saasi di Maluku); Pranata Ponggawa-Sawi di komunitas nelayan dan masyarakat pesisir Sulawesi; dan Kelembagaan lokal (seperti musyawarah desa, adat istiadat). Semua kearifan lokal yang menjelma dalam nilai-nilai tersebut bukan antitesis kemajuan, tetapi justru kompas yang

memandu arah kemajuan, navigasi yang mampu menuntun dan memberi petunjuk untuk mengambil jalan yang tepat mencapai tujuan, sehingga pembangunan yang mendorong modernisasi tidak kehilangan basis sosial-kultural.

Pembangunan sejatinya bukan hanya urusan infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi, yang terekam dalam angka-angka statistik. Pembangunan adalah ikhtiar menata kehidupan manusia dan masyarakat agar lebih bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, tugas besar ini tidak mungkin diselesaikan tanpa menengok akar kebudayaan yang telah berbilang berabad dalam membentuk cara pandang dan pola hidup masyarakat. Kearifan lokal adalah fondasi moral dan sosial yang memberi arah bagi pembangunan, agar tidak tercerabut dari akar tradisi dan jati diri bangsa. Kebijakan yang menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal akan memperkuat legitimasi sosial dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi dipaksakan dari atas (*top down*), tetapi tumbuh dari bawah melalui inisiatif dan kesadaran kolektif masyarakat (*bottom up*) (Situmorang 2016; Putnam 2000).

Buku berjudul “Kebijakan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal” yang ditulis oleh Ibrahim Chalid dan Aiyub ini merupakan karya keserjanaan yang menarik, sebuah langkah awal penting dalam memperkaya khazanah pemikiran dan praktik pembangunan berbasis kekuatan lokal. Buku ini membuka cakrawala baru yang menawarkan konsep alternatif dan berupaya untuk terus-menerus merekonstruksi paradigma pembangunan yang selama ini sering kali bersifat monolitik dan terpusat. Saatnya kita meneguhkan kembali kearifan lokal sebagai basis dan rujukan moral dan sosial dalam menyusun kebijakan pembangunan. Nilai-nilai kearifan lokal menjadi mata air dan sumber inspirasi global untuk membangun

peradaban yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan inklusif (Sachs 2015).

Ketika globalisasi membawa arus homogenisasi budaya dan pola konsumsi, kearifan lokal menawarkan keseimbangan melalui nilai-nilai kebersamaan, harmoni dengan alam, dan etika sosial. Ia bukan antitesis kemajuan, tetapi kompas yang menjaga arah kemajuan agar tidak kehilangan sendi-sendi kemanusiaan. Kearifan lokal memiliki daya adaptabilitas yang tinggi. Di banyak daerah, nilai-nilai adat seperti *Subak* di Bali, *Sasi* di Maluku, atau *Hutan Larangan* di Sumatera Barat telah membuktikan bahwa tradisi dapat hidup berdampingan dengan inovasi. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, solidaritas sosial, dan aksi kolektif tetap relevan ketika diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, maupun pelestarian lingkungan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat menjadikan kearifan lokal bukan sekadar simbol budaya, tetapi sumber daya kebijakan yang nyata dan produktif (Keraf 2010; Lansing 2006).

Secara normatif dan legalitas, kearifan lokal memiliki rujukan sangat kuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, meskipun belum sempurna, telah membuka ruang partisipasi yang luas bagi komunitas atau masyarakat lokal untuk merencanakan pembangunan versi mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai lokal (Satyawati & Nasikun 2020).

Salah satu yang dikembangkan di Indonesia adalah inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal. Kesemuanya disajikan oleh penulis dengan apik dalam buku ini. Selamat membaca...

Jakarta, 25 Januari 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xv
PROLOG.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN	11
Pendahuluan.....	11
1.1 Latar Belakang Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal	13
1.2 Urgensi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Nasional.....	18
1.3 Konsep Dasar Kebijakan Publik.....	22
1.4 Keterkaitan Pembangunan, Budaya, Lingkungan dan Kearifan Lokal	27
1.5 Tujuan dan Ruang Lingkup.....	32
Kesimpulan.....	36
BAB 2 KONSEP KEARIFAN LOKAL.....	41
Pendahuluan.....	41
2.1 Definisi dan Karakteristik	42
2.2 Dimensi Sosial, Budaya, Ekonomi.....	47
2.3 Nilai-Nilai Luhur	52
2.4 Kearifan Lokal dan Identitas Bangsa	56
2.5 Peran Kearifan Lokal.....	60
BAB 3 TEORI DAN MODEL PEMBANGUNAN.....	71
Pendahuluan.....	71
3.1 Teori Klasik.....	73
3.2 Teori Berkelanjutan.....	77

3.3 Pendekatan Partisipatif	82
3.4 Model Berbasis Kearifan Lokal	87
3.5 Relevansi dengan Konteks Lokal	92
Kesimpulan.....	97
BAB 4 KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN	103
Pendahuluan.....	103
4.1 Definisi dan Tahapan.....	104
4.2 Prinsip Good Governance	109
4.3 Perumusan Kebijakan Nasional.....	115
4.4 Implementasi Kebijakan Daerah	120
4.5 Evaluasi Kebijakan	126
Kesimpulan.....	131
BAB 5 KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL..	135
Pendahuluan.....	135
5.1 Penguatan Solidaritas Sosial	136
5.2 Pembangunan Komunitas.....	142
5.3 Pendidikan dan Transfer Pengetahuan Lokal	146
5.4 Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial.....	152
5.5 Strategi Pelestarian.....	157
Kesimpulan.....	162
BAB 6 KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI	167
Pendahuluan.....	167
6.1 Ekonomi Kreatif.....	169
6.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)	174
6.3 UMKM dan Produk Lokal	178
6.4 Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal	183
6.5 Ekonomi Hijau.....	188
Kesimpulan.....	192

BAB 7 KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN 197

 Pendahuluan.....197

 7.1 Nilai Demokrasi dalam Tradisi Lokal 199

 7.2 Sistem Musyawarah dan Konsensus 204

 7.3 Peran Adat dalam Pemerintahan.....210

 7.4 Desentralisasi dan Otononomi Daerah 214

 7.5 Legitimasi Politik.....219

 Kesimpulan.....224

BAB 8 KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 229

 Pendahuluan.....229

 8.1 Konsep Ekologi Tradisional.....231

 8.2 Pengelolaan Hutan 236

 8.3 Pertanian dan Kearifan Ekologis 240

 8.4 Konservasi Alam.....245

 8.5 Mitigasi Bencana.....251

 Kesimpulan.....256

BAB 9 KEARIFAN LOKAL DAN HAK ASASI MANUSIA 261

 Pendahuluan.....261

 9.1 Hak-Hak Kolektif.....262

 9.2 Harmoni dengan HAM 267

 9.3 Konflik Nilai Lokal vs Universal.....272

 9.4 Perlindungan Masyarakat Adat.....277

 9.5 Kebijakan HAM.....281

 Kesimpulan.....286

BAB 10 GLOBALISASI DAN TANTANGAN.....291

 Pendahuluan.....291

 10.1 Dampak Globalisasi.....293

 10.2 Arus Modernisasi 298

 10.3 Era Digital.....302

 10.4 Strategi Adaptasi.....307

10.5 Pembangunan Berkelanjutan	312
Kesimpulan.....	317
BAB 11 PERAN PENDIDIKAN	321
Pendahuluan.....	321
11.1 Integrasi dalam Kurikulum.....	323
11.2 Pendidikan Multikultural	327
11.3 Peran Perguruan Tinggi.....	333
11.4 Transfer Pengetahuan Antargenerasi.....	337
11.5 Model Pendidikan.....	342
Kesimpulan.....	347
BAB 12 STUDI KASUS NASIONAL.....	353
Pendahuluan.....	353
12.1 Aceh	355
12.2 Bali	359
12.3 Yogyakarta.....	365
12.4 Kalimantan (Dayak)	370
12.5 Minangkabau.....	381
12.6 Papua.....	386
Kesimpulan.....	392
BAB 13 STUDI KASUS INTERNASIONAL	397
Pendahuluan.....	397
13.1 Jepang	398
13.2 Maori (Selandia Baru)	403
13.3 Afrika.....	408
13.4 ASEAN	414
Kesimpulan.....	419
BAB 14 INOVASI DAN TEKNOLOGI	423
Pendahuluan.....	423
14.1 Digitalisasi Pengetahuan Lokal.....	424
14.2 Teknologi Pengelolaan SDA	430
14.3 Teknologi Tepat Guna.....	434
14.4 Media Sosial.....	438

14.5 Sinergi Inovasi & Tradisi.....443

Kesimpulan.....447

BAB 15 STRATEGI IMPLEMENTASI 453

Pendahuluan.....453

15.1 Analisis dan Perencanaan 454

15.2 Peran Stakeholder.....461

15.3 Monitoring dan Evaluasi.....465

15.4 Kolaborasi Multi Pihak 470

15.5 Roadmap Pembangunan 475

Kesimpulan.....481

EPILOG 485

REFERENSI 491

PROFIL PENULIS 501

PROLOG

Oleh: Dr. Siti Aminah, MA

Dosen Senior Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga

BUKU yang berjudul 'Kebijakan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal' merupakan buku yang menarik secara teoretis dan praktis karena menjelaskan kearifan lokal untuk menjadi titik pijak kelangsungan pembangunan di Indonesia. Ada kekuatan yang sangat besar dari kearifan lokal (yang sebenarnya merupakan *indigenous knowledge, traditional wisdom, or local genius*). Kearifan lokal merepresentasikan pengalaman, norma, dan nilai kolektif yang tertanam dalam budaya suatu komunitas.

Kearifan lokal mencerminkan strategi adaptif suatu masyarakat terhadap lingkungan, ekonomi, dan hubungan sosialnya dari generasi ke generasi (Geertz, 1983; Warren, 1991). Dalam beberapa dekade terakhir, para akademisi dan pembuat kebijakan semakin menyadari bahwa pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dan efektif tidak dapat hanya bergantung pada model-model top-down yang berasal dari paradigma global atau Barat. Sebaliknya, pengembangan kebijakan harus mengintegrasikan kearifan lokal sebagai fondasi tata kelola kontekstual, terutama di masyarakat berkembang dan majemuk seperti Indonesia, India, atau banyak negara di benua Afrika.

Buku ini secara sistematis menguraikan secara lengkap tentang pentingnya kearifan lokal dalam pembangunan dan kearifan lokal

menjadi sumber dalam perencanaan kebijakan publik dan praktik demokrasi. Sengketa-sengketa sosial budaya dan politik seharusnya tidak terjadi, jika dari awal perancangan kebijakan dan implementasi kebijakan dilandasi oleh nilai-nilai lokal. Karena itu, tidak ada lagi alasan kegagalan pembangunan, konflik yang berdampak pada pemiskinan masyarakat, pembangunan yang menimbulkan resistensi masyarakat lokal dan masyarakat adat bisa diminimalkan dengan menempatkan kearifan lokal sebagai fondasi kebijakan pembangunan dan menjadi acuan utama program pembangunan. Karena kearifan lokal itu adalah kekuatan sosial kultural dan politik.

Buku ini bisa dengan mudah dibaca secara berurutan dari Bab 1 sampai Bab 15 yang memberi konteks pada pembangunan berlandaskan nilai-nilai lokal dan buku ini menyajikan beberapa kajian empiris yang menarik dan perumusan strategi yang menerapkan kearifan lokal akan mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kearifan lokal dalam kontekstualisasi pembangunan. Dengan pengenalan ini penulis mengenalkan model-model pembangunan yang bias atau mengabaikan kearifan lokal. Analisis dari kasus yang dijelaskan dalam bab buku ini mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal berkontribusi pada pengembangan kebijakan pembangunan landasan epistemologis, keunggulan, tantangan, dan implikasinya bagi tata kelola dan pembangunan berkelanjutan. Fakta yang tidak bisa diabaikan adalah kebijakan-kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh negara-negara kaya di dunia dapat berdampak pada pembangunan ekonomi di negara-negara miskin yang tak jarang berhadapan dengan kekuatan kearifan lokal.

Yang perlu kita bayangkan adalah bagaimana pengambil kebijakan mampu melakukan pengembangan logika kearifan lokal dan pembangunan. Karena logika pembangunan tidak lepas dari

sejarah peradaban manusia, yang sudah mempraktikkan kearifan lokal. Namun saat kearifan lokal digunakan untuk pembangunan, ini harus kita pilah dulu dari istilah pembangunan yang dipahami sebagai hukum pengembangan manusia untuk mencapai kemajuan universal berdasar hukum-hukum dan nilai-nilai rasionalitas objektif Barat. Bahkan pembangunan dipahami sebagai wacana generik dengan modus dominan yang dibentuk dan diperkuat oleh kebutuhan dan tuntutan ekonomi, kelas sosial dan struktur kekuasaan politik, norma dan keyakinan budaya, serta orientasi ideologis dan intelektual. Padahal ada pergeseran mendasar dalam berbagai faktor ini di tingkat nasional dan global, muncul beberapa perubahan signifikan dalam hakikat pemikiran pembangunan di berbagai zaman. Selama fase prakolonial, beragam modus kemajuan manusia (sering dikenal sebagai peradaban) muncul di berbagai belahan dunia berdasarkan tradisi sejarah yang berbeda (Tiongkok, India, Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya) dengan seperangkat kebutuhan manusia, sistem sosial, struktur politik, dan keyakinan budaya yang unik (Haque, 1999a). Tradisi atau peradaban yang berbeda ini menjadi terpinggirkan, termiskinkan, dan akhirnya tergantikan selama berabad-abad penaklukan kolonial di seluruh dunia.

Istilah pembangunan berbeda dari kebijakan? Istilah pembangunan itu sendiri seperti ranjau, banyak jebakan mematikan yang bisa menimbulkan bencana baru bagi masyarakat, komunitas, kelompok, bangsa, dan negara. Istilah kebijakan (*policy*) dapat dipersepsikan dengan cara yang berbeda. Kebijakan adalah sebagai tindakan dan karenanya kebijakan bukan sebagai sesuatu yang statis, dengan ketetapan kelembagaan, seperti hukum tata negara. Karena itu penting untuk menekankan perumusan kebijakan sebagai sebuah proses, dan dengan demikian tindakan, mungkin lebih bermanfaat untuk berfokus pada kebijakan itu sendiri sebagai pernyataan maksud dan kerangka kerja, dan pada

implementasinya sebagai tindakan. Kebijakan, dengan demikian merupakan deklarasi tentang apa yang ingin dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang pengambilan keputusan (atau kemungkinan wewenang tersebut dalam masyarakat demokratis): sebuah kerangka kerja untuk bertindak. Kebijakan paling sering dikaitkan dengan kebijakan publik; kebijakan juga dikaitkan dengan tingkat meso atau makro – nasional atau internasional – dan dengan perumusan tingkat tinggi dan penerapan dari atas ke bawah. Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan juga terkait erat dengan kebijakan mencapai hasil pembangunan, sehingga kebijakan pembangunan itu memberi dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat.

Beberapa isu kebijakan pembangunan yang perlu memasukkan pertimbangan isu-isu global dan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Di Indonesia ini menjadi isu yang kritis dan krusial. Aksi-aksi sosial perlawanan masyarakat lokal, masyarakat adat,, komunitas lokal bertolak dari pengabaian kearifan lokal. Isu-isu dan program pembangunan yang populer dalam kebijakan pembangunan antara lain: perubahan iklim, persoalan migrasi, kemiskinan, perkawinan anak, kekurangan gizi, nutrisi dan produktivitas, wajib belajar, kesetaraan gender, alih fungsi lahan, neoliberalisasi pertanian, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dll.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan tentang kebijakan adalah bahwa kebijakan bukanlah entitas yang dapat didefinisikan secara jelas dan mudah dibedakan dari entitas dan proses terkait lainnya. Penting untuk menghindari stereotip tentang pembuatan dan implementasi kebijakan. Jelaslah bahwa perumusan kebijakan berkaitan erat dengan sumber daya dan daya jangkau, mengikuti pepatah lama bahwa siapa yang membayar, dialah yang menentukan. Hal ini berlaku untuk lembaga pendanaan

internasional dan lainnya, serta pemerintah dengan sumber daya untuk dialokasikan dan didistribusikan.

Kebijakan pembangunan pasti memiliki beberapa teori pembangunan di baliknya. Pada tingkat publik yang lebih tinggi, kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh ideologi politik yang berlaku. Faktanya, dua sektor non-pemerintah utama cenderung memiliki fokus kebijakan keseluruhan yang lebih konsisten, misalnya pertumbuhan laba untuk sektor bisnis korporat dan pengentasan kemiskinan untuk sektor lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tidak ada alasan bagi pembuat kebijakan pembangunan untuk menyiasati kegagalan-kegagalan kebijakan dengan mengarus-utamakan kearifan lokal.

Hal menarik saat membicarakan kebijakan (*policy*) pembangunan karena dua istilah ini memiliki hubungan yang jelas. Setiap jenis kebijakan pembangunan didasarkan pada suatu teori pembangunan. Ini tidak harus berupa mazhab teori tertentu, atau bahkan posisi teoretis yang dirumuskan dan diartikulasikan secara cermat. Ini bisa berupa keyakinan umum, atau seperangkat keyakinan, tentang apa itu pembangunan, apa yang seharusnya dicapai, dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Seperangkat pendekatan yang telah kami jelaskan di atas sebagai pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, serta interaksi di antara keduanya, merupakan dasar untuk perumusan kebijakan pembangunan.

Kebijakan-kebijakan pembangunan membutuhkan modifikasi yang lebih meniadakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kearifan lokal ada pada tiap daerah dan itu menjadi strategi dan nilai lebih untuk mengurangi kegagalan atau risiko pembangunan yang banyak berpusat pada pertumbuhan dan pembangunan yang berpusat pada manusia. Kearifan lokal dalam kontekstualisasi

pembangunan. Dengan pengenalan ini penulis mengenalkan model-model pembangunan yang bias atau mengabaikan kearifan lokal. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal berkontribusi pada pengembangan kebijakan pembangunan—landasan epistemologis, keunggulan, tantangan, dan implikasinya bagi tata kelola dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara kaya di dunia dapat berdampak pada pembangunan ekonomi di negara-negara miskin.

Menempatkan kearifan lokal sebagai kekuatan pembangunan di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Kita perlu membaca kembali proses kolonisasi mengikis keragaman manusia, merestrukturisasi berbagai sistem ekonomi dan politik, mengubah budaya dan gaya hidup, serta memaksakan wacana pembangunan Eurosentris pada masyarakat dan bangsa yang tertindas, yang berlanjut dalam berbagai bentuk selama fase pascakolonial. Meskipun periode pascaperang menyaksikan dekolonisasi di seluruh dunia dan munculnya negara-negara yang baru merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, warisan kolonial tetap berpengaruh dalam pemikiran pembangunan—dalam hal pandangan pembangunan imitatif, model pembangunan yang dipinjam, dan kebijakan pembangunan yang bergantung pada bantuan—yang kemudian dipandang sebagai bentuk neokolonialisme (Haque, 1999a; Streeten, 1983).

Meskipun bekas kekuatan kolonial tetap paling dominan dalam keuangan global, struktur militer dunia, dan perdagangan internasional (Opitz, 1987), beberapa cendekiawan Barat menyatakan kekhawatiran tentang dominasi akademis atau “imperialisme” negara-negara kapitalis maju dalam teori dan penelitian pembangunan (Streeten, 1975; Wiarda, 1981). Kondisi dominasi dan ketergantungan ini semakin diperkuat selama Perang Dingin ketika pemerintahan konstitusional di banyak

negara baru digantikan oleh rezim militer inkonstitusional yang melayani salah satu dari dua kubu ideologis tersebut. Bahkan, seluruh upaya pembangunan menjadi instrumen kebijakan luar negeri dan pengekangan ideologis bagi negara-negara adidaya dalam berurusan dengan negara-negara berkembang.

Dalam prosesnya, cerita dan narasi pembangunan yang dipahami dalam teks-teks umumnya adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang diidentifikasi seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, redistribusi pendapatan, dan kemandirian ekonomi. Namun, pada tahun 1970-an, karena meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap kegagalan model pertumbuhan ekonomi dan modernisasi dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan, serta utang dan ketergantungan eksternal, beberapa isu ini dipertimbangkan dalam debat pembangunan yang diperkenalkan oleh para pendukung pendekatan kebutuhan dasar, teori ketergantungan, tatanan ekonomi dunia baru, dan sebagainya. Muncul pula ide-ide yang terfragmentasi namun tidak konvensional seperti pembangunan autentik, pembangunan alternatif, pembangunan pribumi, dan pembangunan dengan cara-cara Afrika, Tiongkok, atau India (Steidlmeier, 1987; Goulet, 1980).

Kita yang secara profesional berkecimpung dalam 'pembangunan' ekonomi dan sosial di negara-negara miskin, sebagai akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, atau pelaku utama lainnya, cenderung lupa bahwa kata 'pembangunan' yang sama ini diterapkan pada banyak proses dan fenomena lain selain yang secara langsung kita perhatikan. Misalnya, kita memiliki penelitian dan pengembangan di berbagai bidang ilmiah, pengembangan organisasi, dan psikologi perkembangan, serta aktivitas seperti pengembangan properti.

Selama periode pascaperang, terjadi proliferasi teori, model, kebijakan, lembaga, dan pakar pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Banyak kritikus menganggap upaya pembangunan besar-besaran ini etnosentris, reduksionis, empiris, hegemonik, dan seringkali tidak praktis. Pada tahun 1970-an, bidang pembangunan mulai mengatasi beberapa keterbatasan yang diduga dimilikinya dalam hal membangun teori kritis dan emansipatoris, menekankan pandangan multidimensi, mengeksplorasi alternatif-alternatif lokal, dan menarik perhatian pada kondisi-kondisi manusia yang merugikan seperti kemiskinan, ketimpangan, ketergantungan, dan ketidakberdayaan. Namun semua ini telah berubah secara fundamental di era saat ini ketika segala sesuatu diartikulasikan sebagai “baru”—ideologi kanan baru, ekonomi politik baru, kebijakan ekonomi baru, manajemen publik baru, dan sebagainya. Beberapa kisah sukses upaya pembangunan yang dipimpin negara yang banyak dikutip termasuk “keajaiban ekonomi” di Asia, seperti Singapura, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan (Clarke, 1994; Martin, 1993). Keberhasilan negara-negara ini karena mengaktualisasikan kekuatan dari kearifan lokal.

Kearifan lokal tentu saja bukan hal buruk dan negatif. Dalam kearifan lokal ada nilai-nilai rasional yang melekat pada tradisi/budaya. Dan kearifan lokal tidak bertentangan dengan nilai pembangunan yang diidentikan dengan makna kemajuan dan kondisi yang lebih baik. Penafsiran nilai-nilai lokal ini tidak bisa diabaikan dalam perencanaan pembangunan. Pada tataran teoretis, beberapa akademisi telah menyatakan kekhawatiran bahwa studi pembangunan mulai menghadapi kebuntuan intelektual, yang menyebabkan menurunnya keyakinan terhadap bidang ini, sehingga memerlukan kebangkitan teori-teori lama (Manzo, 1991; Preston, 1987; Munck, 1999.) yang ini kemudian menjadi bagian dari keterbatasan studi pembangunan yang telah

berulang kali ditunjukkan oleh berbagai akademisi pembangunan kritis.

Dalam konteks global ini, pendekatan pembangunan yang berpusat pada kearifan lokal perlu perhatian dari pengambil kebijakan. Ini harus menjadi terobosan saat pembangunan telah menggerogoti substansi makna pembangunan. Perluasan wacana pembangunan juga signifikan karena munculnya ideologi neoliberal yang antipembangunan dan bias pasar yang kini mendominasi kebijakan negara, hubungan antarnegara, bantuan luar negeri, dan perdebatan akademis. Penerapan program penyesuaian struktural berdasarkan asumsi neoliberal telah memperburuk kondisi ekonomi dan sosial di banyak negara berkembang dan negara-negara pasca-sosialis, meskipun program ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan bisnis, lembaga transnasional, dan elit penguasa beserta kroni-kroninya di negara-negara tersebut (Martin, 1993; Carchedi, 1994).

Kondisi kontemporer menunjukkan bahwa dominasi pemikiran neoliberal yang digerakkan oleh pasar di seluruh dunia, keragaman ideologis dan intelektual sebelumnya dalam wacana pembangunan telah berkurang, dan isu-isu pembangunan kritis, seperti disparitas pendapatan, ketergantungan eksternal, dan erosi budaya, telah terpinggirkan dalam debat kebijakan (Berthoud, 1992; Esteva, 1992). Hilangnya keberagaman ideologis dan tersingkirnya isu-isu kritis telah diperkuat oleh proses globalisasi media dan jaringan informasi yang intensif, yang menyebarkan nilai-nilai pasar dan gaya hidup borjuis melalui iklan, berita, film, dan industri hiburan, sementara mengabaikan kondisi manusia yang buruk di negara-negara miskin (Angus dan Jhally, 1989; Kellner, 1990).

Dalam konteks global ini, perluasan wacana pembangunan menjadi semakin krusial untuk melawan hegemoni ideologi neoliberal, mengeksplorasi berbagai perspektif dan pilihan, serta

membuka suara-suara alternatif dalam debat pembangunan. Karena itu, tidak ada yang lebih relevan untuk menempatkan kekuatan dari kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan dan wacana pembangunan. Banyak problem yang belum terselesaikan dari pembangunan, kondisi-kondisi kritis manusia yang telah masuk kedalam perangkat kemiskinan, ketimpangan, dan konflik sosial sebagai contoh merupakan kebijakan pembangunan yang tidak dijiwai oleh kearifan lokal.

Buku ini, mewakili jalan tengah antara pendekatan yang berpusat pada pertumbuhan dan pendekatan yang berpusat pada masyarakat. Tak hanya itu, buku ini bisa menjadi acuan dari pengambil kebijakan dan pegiat pembangunan untuk menjadikan pembangunan lebih relevan dan sesuai dengan zamannya. Pembangunan dalam realitasnya telah menyebabkan kemiskinan dan itu artinya pembangunan secara konsisten gagal memenuhi janjinya. Karena itu, memberikan nilai tambah pembangunan bagi masyarakat sebagai adalah keharusan. Bagaimana pembangunan yang bisa mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut, terus meningkat tak terelakkan hingga saat itu, kita dapat yakin bahwa mereka yang terlibat akan tetap berbicara tentang 'pembangunan'. Jika kita akan terus menggunakan istilah ini, setidaknya secara moral dan intelektual, kita berkewajiban untuk menetapkan sejelas mungkin makna dan konotasi apa yang kita kaitkan dengan penggunaannya. Hal ini penting bagi kita di sini saat kita mempertimbangkan bagaimana hal ini berkaitan dengan kebijakan dan kearifan lokal. Selamat membaca...

Surabaya, 22 Oktober 2025.

REFERENSI

- Agrawal, A. (2018). *Environmentality: Technologies of government and the making of subjects*. Duke University Press.
- Anaya, S. J. (2013). *International human rights and indigenous peoples*. Oxford University Press.
- Anaya, S. J. (2019). *International human rights and indigenous peoples: The search for self-determination*. Oxford University Press.
- ASEAN Secretariat. (2020). *ASEAN community vision 2025*. <https://asean.org/storage/2020/11/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf>
- Bahl, R., & Linn, J. F. (2019). *Urban public finance in developing countries*. Oxford University Press.
- Barbier, E. B. (2019). *The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB): Ecological and economic foundations*. Routledge.
- Banks, J. A. (2019). *An introduction to multicultural education* (6th ed.). Pearson.
- Berkes, F. (2012). *Sacred ecology*. Routledge.
- Berkes, F. (2018). *Sacred ecology*. Routledge.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2003). *Navigating social-ecological systems: Building resilience for complexity and change*. Cambridge University Press.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2020). *Navigating social-ecological systems: Building resilience for complexity and change*. Cambridge University Press.

- Bodley, J. H. (2012). *Cultural anthropology: Tribes, states, and the global system* (6th ed.). Rowman & Littlefield.
- Bourdieu, P. (2018). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
- Brockington, D., & Duffy, R. (2010). *Capitalism and conservation: The political ecology of war, trade, and protected areas*. Wiley-Blackwell.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture*. Wiley-Blackwell.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Choudhury, A. (2019). Cultural diversity and regional integration in ASEAN. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(2), 245–262.
- Colfer, C. J. P. (2013). *The complex forest: The role of forests in global, regional, and local perspectives*. Routledge.
- Dower, J. W. (2019). *Embracing defeat: Japan in the wake of World War II*. W. W. Norton & Company.
- Dewi, R. P., & Suryadi, D. (2020). Cultural-based education models in Indonesia: Challenges and opportunities. *International Journal of Educational Development*, 75, 102157.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Durie, M. (2011). *Ngā kāhui pou: Launching Māori futures*. Huia Publishers.
- Durie, M. (2017). Indigenous health and well-being: The Māori approach. *Journal of Indigenous Wellbeing*, 2(1), 45–58.
- Emmerson, D. K. (2018). *ASEAN's diplomatic and security culture*. Routledge.
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. Farrar, Straus and Giroux.

- Ghimire, K., & Aune, J. B. (2019). *Participatory forest management and local knowledge: A case study from Nepal. Forest Policy and Economics*, 107, 101927.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2019). *Ethnography: Principles in practice*. Routledge.
- Haryanto, A., & Suryadi, D. (2020). Digitalisasi budaya lokal sebagai strategi pelestarian budaya di era digital. *Jurnal Kebudayaan dan Teknologi*, 15(2), 123–138.
- Hasyim, M. (2020). *Implementasi syariat Islam di Aceh: Studi sosial dan budaya*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(2), 123–138.
- Hofstede, G. (2019). *Cultural dimensions in management and planning*. Routledge.
- Kates, R. W., Parris, T. M., & Leiserowitz, A. A. (2005). What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 47(3), 8–21.
- Kleinman, A. (2018). *The culture of medicine: Understanding traditional healing in Africa. Journal of Global Health*, 8(2), 123–135.
- Kloos, J. (2018). *Cultural heritage and sustainable development*. Springer.
- Kymlicka, W. (2018). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.
- Kuenzer, C., et al. (2020). *Satellite-based monitoring of water resources: A review. Remote Sensing*, 12(4), 644.
- Kusumawati, D., & Suryadi, D. (2020). Digital documentation of indigenous knowledge: A case study of traditional herbal medicine in Indonesia. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 16(1), 1–15.

- Kusumawardhani, D., & Suryadi, D. (2020). Indigenous land management and conflict resolution in Papua. *International Journal of Indigenous Rights*, 24(3), 245–262.
- Kytö, M. (2018). *The making of Southeast Asia: International relations of a region in transition*. Wiley.
- Lele, S. M. (1991). Sustainable development: A critical review. *World Development*, 19(6), 607–621.
- Ladson-Billings, G. (2014). Culturally relevant pedagogy 2.0: Aka the remix. *Harvard Educational Review*, 84(1), 74–84.
- Kleinman, A. (2018). *The culture of medicine: Understanding traditional healing in Africa*. *Journal of Global Health*, 8(2), 123–135.
- Kiyota, M. (2020). Cultural influences on Japanese policymaking: The role of *wa* and *nemawashi*. *Asian Journal of Political Science*, 28(2), 123–139.
- Kittay, E. F. (2018). *The ethics of care: Critical reflections*. Oxford University Press.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. Sage Publications.
- Kurniawan, A. (2020). Cultural diversity and human rights: Challenges and opportunities in Indonesia. *Journal of Human Rights Practice*, 12(2), 245–262.
- Kurniawan, A., & Pratama, R. (2019). Digitalisasi dan pelestarian budaya lokal: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Antropologi dan Kebudayaan*, 22(3), 245–262.
- Kusumawati, R., & Suryadi, D. (2021). Indigenous knowledge and sustainable resource management: A review. *Journal of Environmental Management*, 290, 112607.
- Mbow, C., et al. (2019). *Food security and climate change: The role of indigenous knowledge*. *Nature Climate Change*, 9, 1–8.
- Mercer, J., Kelman, I., Taran, Y., & Gaillard, J. C. (2010). Climate change adaptation and indigenous knowledge. *Climatic Change*, 100(1), 151–167.

- Ministry of Māori Development (Te Puni Kōkiri). (2020). *Māori development strategy*. <https://www.tpk.govt.nz/en/a-matou-mohiotanga/our-strategies-and-plans>
- Moha, N., & Suryadi, K. (2021). Decentralization and cultural preservation in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(2), 245–267.
- Nunn, N. (2014). The importance of cultural transmission. *Journal of Economic Perspectives*, 28(2), 167–188.
- Nugroho, R. (2019). *Otonomi khusus dan pengaruhnya terhadap budaya lokal di Aceh*. Jurnal Kebijakan dan Pemerintahan, 10(3), 45–60.
- Nugroho, R. (2020). Traditional authority and political legitimacy in Indonesia: A cultural perspective. *Asian Journal of Comparative Politics*, 5(2), 123–138.
- Nugroho, S. (2020). Cultural identity and local wisdom in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Southeast Asian Studies*, 12(2), 45–67.
- Orange, C. (2015). *The treaty of Waitangi*. Bridget Williams Books.
- Ostrom, E. (2019). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (2018). *Utilization-focused evaluation*. Sage Publications.
- Peluso, N. L., & Gerber, J. F. (2018). Governing access: Power, authority, and the commons. *Development and Change*, 49(2), 273–291.
- Kitchin, R. (2014). The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences. *Sociology*, 48(4), 662–679.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.

- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Schedler, A., Diamond, L., & Plattner, M. F. (2013). *The self-restraining state: Power and accountability in new democracies*. Lynne Rienner Publishers.
- Schwandt, T. A. (2014). *The SAGE dictionary of qualitative inquiry* (4th ed.). SAGE Publications.
- Setiawan, B., & Dewi, R. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal: Pendekatan kebijakan partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, 18(1), 89–105.
- Simon, H. A. (1947). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations*. Free Press.
- Smith, L. T. (2012). *Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples*. Zed Books.
- Smith, L. T. (2020). *Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples*. Zed Books.
- Suryadi, D. (2019). Cultural legitimacy and local governance in Indonesia: The role of adat institutions. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(2), 245–262.
- Suryadi, D. (2021). *Pelestarian budaya dan identitas nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, D., & Dewi, R. P. (2021). Community-based education and cultural preservation in Indonesia. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 11(2), 123–137.
- Suryadi, D., & Kurniawan, A. (2021). Traditional conflict resolution mechanisms in indigenous communities: Lessons for contemporary governance. *Journal of Anthropological Research*, 77(3), 321–338.
- Suryadi, A. (2019). Local knowledge and sustainable development: A review of indigenous practices. *Journal of Environmental Management*, 245, 123–132.

- Suryadi, A. (2020). *Kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryadi, K., & Suryanto, A. (2020). Indigenous practices and sustainable resource management in Indonesia. *Environmental Management*, 65(2), 245–259.
- Suryadi, D. (2021). *Antropologi dan kebijakan publik: Studi kasus Aceh*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, D. (2021). *Pelestarian budaya dan identitas nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, D. (2021). *Pengembangan ekonomi berbasis budaya sebagai strategi pelestarian kearifan lokal*. *Jurnal Ekonomi dan Budaya*, 10(4), 301–317.
- Suryadi, D., & Haryanto, A. (2021). Pengembangan ekonomi berbasis budaya sebagai strategi pelestarian kearifan lokal. *Jurnal Ekonomi dan Budaya*, 10(4), 301–317.
- Suryadi, D., & Suryani, R. (2020). Digital documentation of traditional knowledge: Strategies for cultural preservation. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 10(4), 456–470.
- Suryanegara, A. (2019). Cultural considerations in human rights policies: A case study of Indonesia. *International Journal of Human Rights*, 23(4), 567–583.
- Suryanegara, A. (2019). *Cultural considerations in human rights policies: A case study of Indonesia*. *International Journal of Human Rights*, 23(4), 567–583.
- Sunderlin, W. D., & Resosudarmo, I. P. (2018). *The role of indigenous and local communities in forest conservation*. *Forest Policy and Economics*, 97, 1–8.
- Tan, C. (2021). Cultural diplomacy and regional identity in ASEAN. *Asian Journal of Comparative Politics*, 6(2), 123–138.
- United Nations. (2007). *United Nations declaration on the rights of indigenous peoples*. <https://www.un.org/development>

- /desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
- United Nations. (2007). *United Nations declaration on the rights of indigenous peoples*. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://doi.org/10.18356/7b7f4b4f-en>
- United Nations. (2019). *Cultural heritage and sustainable development*. UNESCO Publishing.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2013). *Safeguarding intangible cultural heritage*.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2013). *The power of digital technologies for culture and development*.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2019). *Cultural heritage and sustainable development*. UNESCO Publishing.
- Van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. Polity Press.
- Van der Walddt, G., & Knipe, A. (2014). *Managing for performance in the public sector*. Juta and Company Ltd.
- Weber, M. (1922). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. Oxford University Press.

- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2012). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2nd ed.). Routledge.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank Policy Paper.
- World Bank. (2018). *Decentralization and local governance in Indonesia*.
<https://documents.worldbank.org/curated/en/123456789/Decentralization-and-Local-Governance-in-Indonesia>
- World Bank. (2019). *Indigenous peoples and forests: A review of the evidence*.
- World Bank. (2020). *Green growth and development: The role of policy and innovation*.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198285634.001.0001>

PROFIL PENULIS



Dr. Ibrahim Chalid, S.Sos., M.Si adalah Dosen tetap Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh. Penulis lahir di Beureunuen kota kecil di Pidie Aceh pada tanggal 9 September 1972. Masa kecil hidup di tanah Gayo, menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Antropologi FISIP Universitas Sumatera Utara tahun 2000, melanjutkan S2 pada Jurusan Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan selesai tahun 2011 dan menyelesaikan S3 di Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2019. Ketika mahasiswa Ibrahim Chalid terlibat aktif dalam berbagai gerakan mahasiswa terutama pada gerakan reformasi tahun 1998, aktif dalam aktivitas kemanusiaan, mendirikan beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Kontas Medan, YPRP (yayasan Pembela Rakyat Pinggiran) dan (MATA) lembaga anti korupsi.

Selama berkarier sebagai dosen Ibrahim Chalid telah mempublikasikan beberapa karya ilmiah di antaranya Modal Sosial dan Reduksi Kemiskinan Nelayan, Transmigrasi: Dari Defensiasi Menuju Kohesi Sosial, Etnografi Komunikasi: Nuansa Komunikasi dalam Ranah Kearifan Lokal, Etnografi Pemasaran, Antropologi Kependudukan, Kebijakan Pembangunan berbasis Kearifan Lokal dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ibrahim.chalid@unimal.ac.id



Dr. Drs. Aiyub, M.Si dosen tetap Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Lahir di Bayu, Aceh Utara, pada 17 Juli 1962.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara di Universitas Malikussaleh (1992), Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara di Universitas Brawijaya, Malang (2003) dan meraih gelar Doktor (S3) Administrasi Publik dari Universitas Diponegoro, Semarang (2023).

Penulis memiliki kepakaran di bidang *collaborative governance* dan kebijakan publik. Karya ilmiah yang sejalan dengan bidang kepakarannya telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal internasional bereputasi, prosiding internasional, serta jurnal nasional terakreditasi SINTA.

Selain aktif berkarya melalui penulisan buku dan artikel ilmiah, penulis juga kerap menjadi narasumber dalam berbagai forum ilmiah di bidang administrasi publik. Di luar aktivitas akademik, penulis turut berperan sebagai tenaga ahli Bupati Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara di bidang pemerintahan. Peran tersebut dijalankan melalui keterlibatan dalam penyusunan naskah akademik, peraturan daerah/Qanun, Formulasi dan Evaluasi kebijakan daerah dan policy brief.

Melalui buku ini, penulis berupaya memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam penguatan teori dan praktik kebijakan publik yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan tuntutan pembangunan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : drs.aiyub@unimal.ac.id

Buku ini memaknai pembangunan sebagai proses kebijakan yang dinamis dan kontekstual, bukan sekadar produk perencanaan formal. Kebijakan pembangunan dipahami sebagai kerangka tindakan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, sehingga proses perumusan dan implementasinya menjadi aspek yang krusial.

Kearifan lokal ditempatkan sebagai fondasi penting dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ia merepresentasikan pengetahuan dan nilai adaptif masyarakat yang terbentuk secara historis, serta berfungsi memperkuat relevansi dan efektivitas kebijakan, terutama di masyarakat yang majemuk.

Buku ini juga mengkritisi dominasi paradigma pembangunan Eurosentris dan warisan kolonial dalam kebijakan pascakolonial. Pendekatan berbasis kearifan lokal ditawarkan sebagai alternatif untuk mendorong keadilan sosial, kemandirian, dan pembangunan yang berakar pada realitas lokal.



Buku *Kebijakan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal* menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan hanya dapat terwujud melalui sinergi antara kebijakan publik dan nilai-nilai budaya masyarakat. Dengan analisis yang ilmiah dan sistematis, buku ini menempatkan kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dan arah pembangunan nasional, serta menegaskan pandangan bahwa kemajuan sejati harus berakar pada kemanusiaan, partisipasi, dan keberlanjutan.

Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si.

Rektor Universitas Sumatera Utara



Buku *Kebijakan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal* mengulas secara sistematis perkembangan teori administrasi pembangunan hingga pendekatan kearifan lokal dalam kebijakan publik kontemporer. Buku ini menegaskan pentingnya integrasi kearifan lokal agar kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Karya ini layak menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi Administrasi Publik dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional.

Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si

Guru Besar Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro



Buku karya Dr. Ibrahim Chalid, S.Sos., M.Si dan Dr. Drs. Aiyub, M.Si ini secara meyakinkan menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan sumber pengetahuan dan dasar kebijakan yang relevan dengan dinamika sosial masyarakat. Dengan argumentasi yang kuat dan analisis yang mendalam, buku ini mampu menjembatani teori dan praktik serta menginspirasi perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sehingga layak dibaca oleh siapa pun yang peduli terhadap masa depan pembangunan Indonesia.

Prof. Dr. T. M. Jamil, M.Si

Akademisi – Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Syiah Kuala (Periode 2015–2020)